

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Serang, 26 September 2022

**AYANI**  
NIM : 161120110

## ABSTRAK

Nama : Ayani, NIM : 161120110, Judul Skripsi : Kewenangan DPD melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah lembaga yang telah diakui secara konstitusional, dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak lain ialah untuk mewakili aspirasi daerah. Aspirasi ditingkat daerah akan mempengaruhi pembentukan kebijakan atau pengambilan keputusan politik ditingkat pusat serta untuk menciptakan mekanisme yang saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan negara dan antar lembaga legislatif. Adapun fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) didalam hal sebuah pengawasan terhadap Rancangan peraturan daerah (Raperda) dan Peraturan daerah (Perda) telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 22D.

Perumusan masalah peneliti ini adalah bagaimana kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan apa implikasi yang muncul dari kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Tujuan Penelitian dari skripsi ini adalah : 1). Untuk menjelaskan proses kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi raperda dan perda. Untuk menjelaskan kesesuaian pengawasan dan evaluasi Dewan Perwakilan Daerah kepada raperda dan perda terhadap konsep otonomi daerah di Indonesia.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian pustaka (Library Research) atau data primer, data sekunder dan tersier sebagai sumber penelitian hukum untuk memecah permasalahan yang diteliti.

Dari penelitian dapat disimpulkan : 1). Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) Pasal 249 Ayat (1) huruf j bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D Ayat (3). Karena tidak adanya aturan yang jelas tentang pengawasan terhadap terhadap Rancangan peraturan daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) seperti yang diatur dalam Pasal 249 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Dan Implikasi yang muncul dari kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ialah dapat memperkuat fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemberian kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Rancangan peraturan daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kata Kunci : *DPD, Kewenangan, Raperda dan Perda*



**KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN Sultan Maulana Hasanuddin
	a.n. AYANI	Banten
	NIM: 161120110	di
		Serang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Ayani**, NIM: **161120110**, Judul Skripsi: **Kewenangan DPD melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2018**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 26 September 2022

Pembimbing I

**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690214 199903 2 001

Pembimbing II

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19870516 201903 2 008

## PERSETUJUAN

### KEWENANGAN DPD MELAKUKAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018

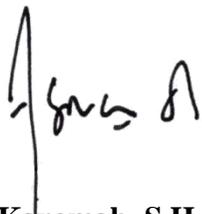
Oleh:

**Ayani**

NIM: 161120110

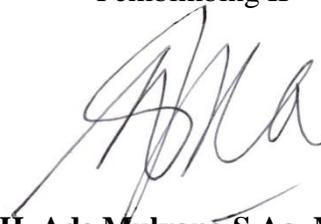
Mengetahui,

Pembimbing I



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690214 199903 2 001

Pembimbing II



**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19870516 201903 2 008

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690214 199903 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi: a.n.: **Ayani**, NIM: **161120110**, berjudul: *Kewenangan DPD melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2018*, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 14 Desember 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.  
Serang, 14 Desember 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

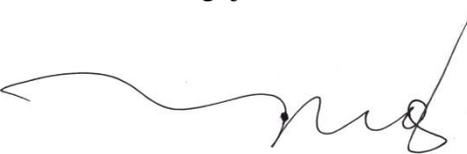
Sekretaris Merangkap Anggota,



**M. Riza Pahlefi, M.Pd**  
NIP. 19950201 201903 1 005

Anggota-Anggota,

Penguji I



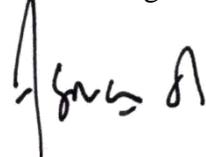
**H. Masduki, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19731105 199903 1 001

Penguji II



**Drs. Akhmad Marjuki, M.H.**  
NIP. 19641011 199103 1 004

Pembimbing I



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690214 199903 2 001

Pembimbing II



**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19870516 201903 2 008

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat yang diberikan-Nya. Penulis Persembahkan Sebuah Skripsi ini kepada orang yang paling berharga dalam hidup saya yaitu, Abang **Topik** dan Ibu **Sartunah** karena kalian berdua hidup terasa lebih mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih telah menjaga saya dalam doa-doa kalian serta selalu mendukung impian saya apapun itu, dan rasa kasih sayang baik moril maupun materil yang tak ternilai harganya, Semoga pengorbanan dan do'a suci abang dan ibu dapat menjadi pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin...

## ***MOTTO***

*“Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan,  
tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan”*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama lengkap Ayani lahir di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, pada tanggal 12 Juni 1996, anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Palmin dan Ibu Sartunah. Yang beralamat di Kampung. Rancailat Desa Rancailat Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar Negeri Rancailat II, yang berada di Desa Rancailat Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada tahun 2009, melanjutkan sekolah di MTs. Negeri Sukamulya Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten lulus pada tahun 2012, melanjutkan ke MAN Kronjo Kecamatan Kronjo lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tahun 2016 dengan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara/Siyasah. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan organisasi diantaranya:

1. Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) tahun 2017 sebagai Sekretaris bidang Minat dan Bakat (MIKAT)
2. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun 2018 sebagai Anggota Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pembinaan Anggota (P3A)
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) pada tahun 2017 sebagai sekretaris bidang eksternal
4. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Pada tahun 2018 sebagai sekretaris bidang Pemberdaya Aparatur Organisasi (PAO)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan karunian-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kewenangan DPD melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri Tauladan Nabi Muhammad Saw, penghulu para nabi yang telah membawa perubahan dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan islam sehingga dapat seperti saat ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan hasil skripsi ini.

Di dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan dan Bapak Arif Rahman, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., Pembimbing, yang telah memberikan Nasihat, membimbing, dan pengarahan serta meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik Fakultas Syariah, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu

berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Rekan-rekan Seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara dan Organisasi (HIMATA, HMI) yang telah memberikan motivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya penulis ini turut mewarnai Khazanah Ilmu Pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 27 September 2022

Penulis

**AYANI**  
NIM: 161120110

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran.....	13
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH</b>	
A. Pengertian Lembaga DPD.....	30
B. Sejarah terbentuknya lembaga DPD .....	33

C. Fungsi dan wewenang lembaga Dewan Perwakilan Daerah .....	39
1. Fungsi Legislasi .....	41
2. Fungsi pertimbangan.....	42
3. Fungsi pengawasan .....	43
D. Kedudukan Lembaga DPD .....	44

### **BAB III TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN DEWAN**

#### **PERWAKILAN DAERAH**

A. Kedudukan DPD dalam sistem bikameral .....	51
B. Trias Politica di Indonesia.....	60
1. Kekuasaan Eksekutif.....	62
2. Kekuasaan Legislatif.....	64
3. Kekuasaan Yudikatif.....	65
C. Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif ( <i>Checks and Balances</i> ).....	70
D. Kewenangan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi .....	77

### **BAB IV KEWENANGAN DPD MELAKUKAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018**

A. Bagaimana kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan	
---	--

daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.....	83
B. Apa implikasi yang muncul dari kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah .....	105

## **BAB V PENUTUP**

A Kesimpulan .....	111
B Saran .....	112

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



